



# OPTIMALISASI LAYANAN PUBLIK DI INDONESIA MELALUI *e-GOVERNMENT* DAN PEMANFAATAN SATU DATA INDONESIA



# BIODATA

**Dr. DRS. LA ODE AHMAD, AP, M.Si.**



## RIWAYAT JABATAN

- PLT. STAF AHLI MENTERI BIDANG APARATUR DAN PELAYAN PUBLIK
- DIREKTUR KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
- PJ. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
- DIREKTUR POLITIK DALAM NEGERI
- DIREKTUR ORMAS



## RIWAYAT PENDIDIKAN

- SARJANA ILMU PEMERINTAHAN/STPDN/IIP
- MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN/IPDN
- DOKTOR ILMU PEMERINTAHAN/IPDN



## ALAMAT

Jalan Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat, Gedung F Lantai 5, Direktorat Politik Dalam Negeri, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri



+6282288888187



(021) 3845367



# OUTLINE

- **Urusan Pemerintahan**
- **Transformasi Global**
- **Transformasi Pemerintahan**
- **Transformasi Digital dilingkungan Kemendagri**
- **Pemanfaatan Satu Data**
- **Pelayanan Publik Digital**



# URUSAN PEMERINTAHAN



## URUSAN PEMERINTAHAN

### PRESIDEN

Pasal 5 ayat (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PUSAT

### MENTERI

Pasal 5 ayat (3) Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Presiden dibantu oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan tertentu

*Pasal 5 ayat (2)  
Kekuasaan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam berbagai urusan pemerintahan*

### AZAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 5 ayat (4) : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan

DAERAH

DESENTRALISASI

DEKONSENTRASI

TUGAS PEMBANTUAN

Pembagian Urusan Pemerintahan



# URUSAN PEMERINTAHAN

## ABSOLUT

1. Pertahanan
2. Keamanan
3. Agama
4. Yustisi
5. Politik Luar Negeri
6. Moneter dan Fiskal

## KONKUREN

### WAJIB

Urusan  
Wajib  
Pelayanan  
Dasar :  
6 Urusan

Urusan Wajib  
Non Pelayanan  
Dasar :  
18 Urusan

### PILIHAN

Urusan Wajib  
Non Pelayanan  
Dasar :  
8 Urusan

## UMUM

1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan
2. Pembinaan Persatuan
3. Pembinaan Kerukunan
4. Penanganan Konflik Sosial
5. Koordinasi Antar Lembaga
6. Pengembangan Demokrasi
7. Urusan Pemerintahan Lainnya



# URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

## WAJIB

### Pelayanan Dasar

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4. Sosial
5. Perumahan rakyat dan permukiman
6. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

### Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga kerja
2. Perlindungan Perempuan dan Anak
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan Hidup
6. Administrasi dan Pencatatan Sipil
7. Pemberdayaan Masyarakat Desa/PMD
8. Pengendalian Penduduk dan KB
9. Perhubungan
10. Komunikasi-Informasi
11. Koperasi dan UKM
12. Penanaman Modal
13. Kepemudaan dan Olahraga
14. Statistik
15. Persandian
16. Kebudayaan
17. Perpustakaan, dan
18. Arsip

## PILIHAN

### Potensi, Ketenagakerjaan,

1. Kelautan dan Perikanan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Kehutanan
5. Energi dan Sumberdaya Mineral
6. Perdagangan
7. Perindustrian, dan
8. Transmigrasi

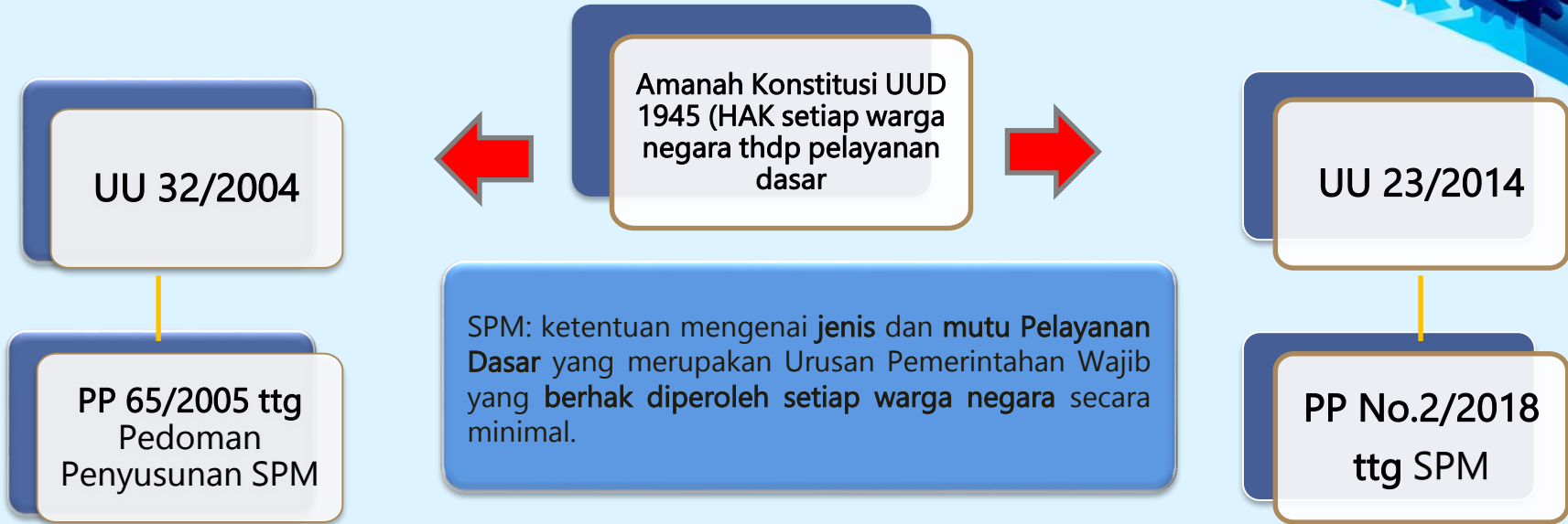
Urusan berbasis Ekosistem :  
Kehutanan, ESDM, Kelautan dan Perikanan

Provinsi

Kabupaten/Kota  
dapat bagi hasilnya



## PERUBAHAN TATANAN KEBIJAKAN SPM







# AMANAT PENERAPAN SPM

**Pasal 1 Butir 17 : Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.**

Pelaksanaan SPM yang mengatur tentang jenis pelayanan, mutu pelayanan dan penerima pelayanan dasar dan strategi penerapannya

**Pasal 18: Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

**UU  
23 2014**

**Pasal 298: Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal**





# REGULASI PENERAPAN SPM

## PETUNJUK UMUM

Kemendagri



Permendagri 100  
Tahun 2018

Secara teknis memuat tentang mekanisme dan strategi penerapan SPM mulai dari pengumpulan data, penghitungan pemenuhan kebutuhan dasar, perencanaan SPM, dan pelaksanaan SPM serta pelaporan

## PETUNJUK TEKNIS

KL Teknis



Permendikbud 32/2018

Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan



Permenkes 4/2019

Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan



PermenPUPR 29/Prt/M/2018

Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



Permendagri 121/2018

Tentang standar teknis mutu pelayanan dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/kota



Permendagri 101/2018

Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Sub-Urusan Bencana Daerah kabupaten/kota



Permendagri 114/2018

Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/kota



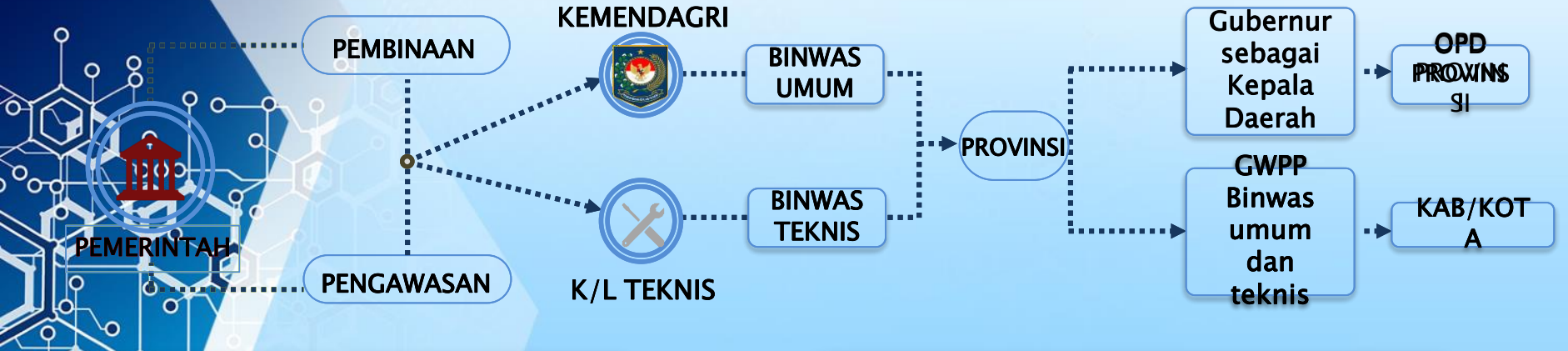
Permensos 9/2018

Tentang Standard teknis pelayanan dasar pada SPM bidang sosial Di daerah provinsi dan di Daerah Kab/Kota



# PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN SPM

Pasal 373 s.d 378, UU 23 2014



## Pembinaan dan Pengawasan Umum

- Menteri, terhadap penerapan SPM Daerah Provinsi
- GWPP terhadap penerapan SPM Daerah Kab/Kota
- Gubernur dan Bupati/Walikota, terhadap PD masing-masing

## Pembinaan dan Pengawasan Teknis

- Menteri Teknis Pengampu SPM, terhadap penerapan SPM Daerah Provinsi
- GWPP terhadap penerapan SPM Daerah Kab/Kota
- Gubernur dan Bupati/Walikota, terhadap PD masing-masing



# TRANSFORMASI GLOBAL



# PENDAHULUAN



**5 - 10 TAHUN KEDEPAN DUNIA MASIH DIHADAPKAN PADA UPAYA PENANGGULANGAN PANDEMI COVID 19 DAN BERDAMPAK TERHADAP KONDISI PEKONOMIAN DUNIA (IMF WEO, 2021).**



**PANDEMI MENDORONG DISRUPSI INOVASI DAN TUNTUTAN ADAPTASI ORGANISASI.**



**KUNCI ADAPTASI PALING UTAMA ADALAH PENYESUAIAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN GAYA KEPEMIMPINAN (WEF, 2020).**

# TREND DAN TANTANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS

## EKONOMI

MELAMBATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI DAN MENURUNNYA INTERAKSI EKONOMI GLOBAL (SLOWBALIZATION) SERTA PERUBAHAN ORIENTASI YANG MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN INTERNAL Masing2 NEGARA

## POLITIK

TUNTUTAN KINERJA KEBIJAKAN PEMULIHAN EKONOMI MELALUI PENINGKATAN KESEHATAN DAN BANTUAN MASYARAKAT YANG TERDAMPAK

## SOSIAL BUDAYA

GAYA HIDUP DIGITAL, MENINGKATNYA KESENJANGAN DAN KEBUTUHAN PENGUATAN SOLIDARITAS DAN TRUST ANTAR KELOMPOK DAN ANTARA MASYARAKAT DENGAN PEMERINTAH

## TEKNOLOGI

AKSELERASI INOVASI YANG MENDUKUNG POLA KERJA FLEKSIBEL DAN PRODUKTIF





# TRANSFORMASI GLOBAL



**REVOLUSI INDUSTRI 1.0**  
MESIN UAP MERUBAH  
MODEL BISNIS  
INDUSTRY DAN BUDAYA  
HIDUP MASYARAKAT



**REVOLUSI INDUSTRI 2.0**  
DITEMUKANNYA LISTRIK YANG  
LEBIH SIMPLE, MURAH &  
RENDAH POLUSI,  
MEMPENGARUHI MANUSIA UTK  
BRUSHA & HIDUP SE-HARI2

**REVOLUSI INDUSTRI 3.0**  
KEBERADAAN COMPUTER,  
INTERNET DAN APLIKASI  
MENGHASILKAN INOVASI-  
INOVASI DALAM  
INDUSTRIALISASI DAN  
GAYA HIDUP MANUSIA



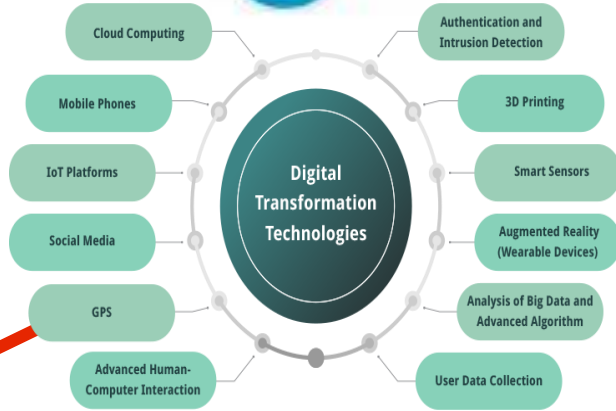
**REVOLUSI INDUSTRI 4.0**  
TEKNOLOGI MOBILE, IOT,  
CLOUD, KECERDASAN  
BUATAN, DLL  
MENGHASILKAN INOVASI-  
INOVASI TERPADU YANG  
MENGHASILKAN LAYANAN  
YG LEBIH EFEKTIF,  
EFISIEN DAN RANTAI NILAI  
LAINNYA

1800

1900

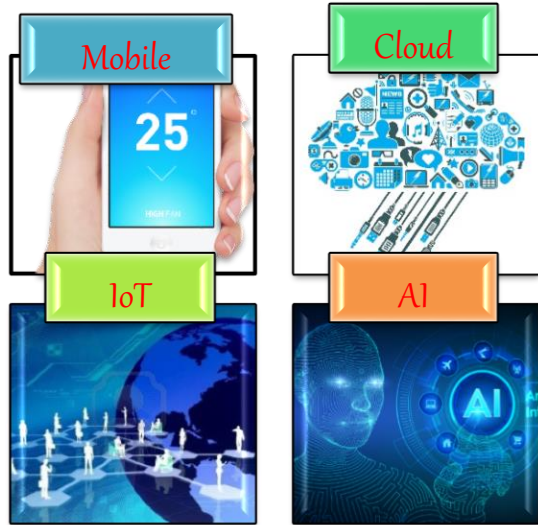
2000

NOW

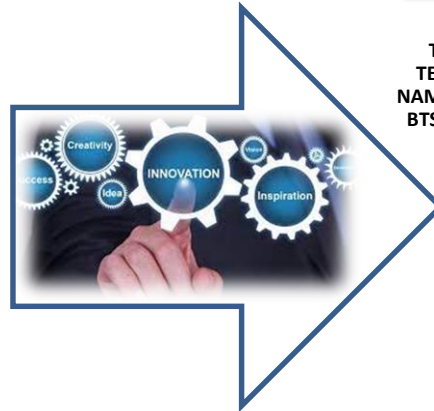




# 4 Kekuatan Super Dunia Modern yang mendorong Transformasi Global



**TEKNOLOGI**



**INOVASI**



**SUKSES**



PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI TERBESAR DI DUNIA, NAMUN TIDAK MEMILIKI BTS DAN JARINGAN FO RIBUAN KM



PERUSAHAAN TAXI YANG TIDAK MEMILIKI TAXI



MEDIA MASSA DENGAN WARTAWAN TERBANYAK DI DUNIA (SETIAP PENGGUNA ADALAH WARTAWAN)



PERUSAHAAN BIOSKOP YANG TIDAK MEMILIKI GEDUNG BIOSKOP



TIDAK PERLU MENUNGGU PENSUEN DAN MODAL BESAR UNTUK MEMILIKI TOKO BESAR



SAAT INI BANK PUNYA TELLER HAMPPIR SEBANYAK JUMLAH NASABAHNYA





# TRANSFORMASI PEMERINTAHAN



## PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN UNTUK PENCIPTAAN *SMART GOVERNANCE*

SESUAI ARAHAN PRESIDEN,  
MEMBUTUHKAN KEBERANIAN  
UNTUK MERUBAH TATAKELOLA  
PEMERINTAHAN YANG LEBIH  
SMART UNTUK MEMBANGUN  
INDONESIA MAJU  
*SMART GOVERNANCE* DIARTIKAN  
SEBAGAI TATA KELOLA  
PEMERINTAHAN BERBASIS  
KOLABORASI BAIK ANTAR INSTANSI  
PEMERINTAH MAUPUN NON  
PEMERINTAH DENGAN  
MEMANFAATKAN TEKNOLOGI  
KOMUNIKASI DAN INFORMASI  
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN  
TUJUAN PEMBANGUNAN NEGARA



## BERANI BERUBAH DAN MENGUBAH ADALAH **FONDASI** **MEMBANGUN** INDONESIA MAJU

"Di tengah dunia yang penuh disrupsi  
sekarang ini, karakter berani untuk  
berubah, mengubah, dan mengkreasi  
hal-hal baru, merupakan fondasi untuk  
membangun Indonesia Maju."

*Presiden Jokowi*



76<sup>TH</sup>  
INDONESIA  
TANGGUH  
INDONESIA  
TUMBUH



# ARAHAN PRESIDEN

## PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL



### PERCEPAT INTEGRASI PUSAT DATA NASIONAL

PERSIAPAN *ROADMAP* TRANSFORMASI DIGITAL DI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS, BAIK SEKTOR PEMERINTAHAN, LAYANAN PUBLIC, BANTUAN SOSIAL, PENDIDIKAN, KESEHATAN, PERDAGANGAN, INDUSTRI MAUPUN PENYIARAN

PERLUASAN AKSES DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DIGITAL

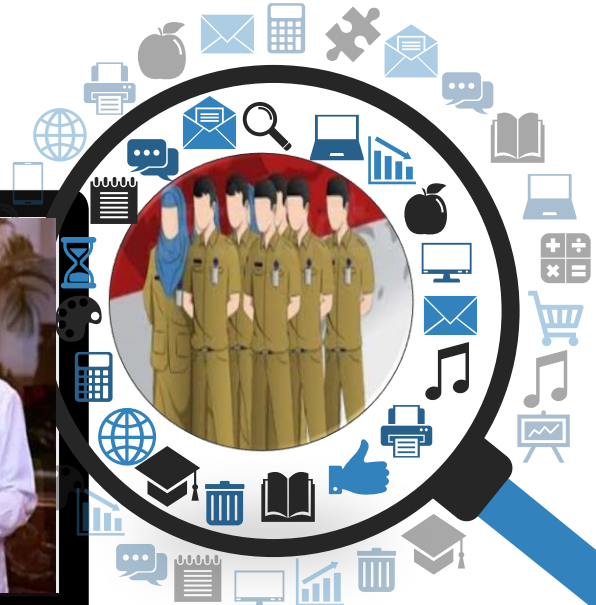
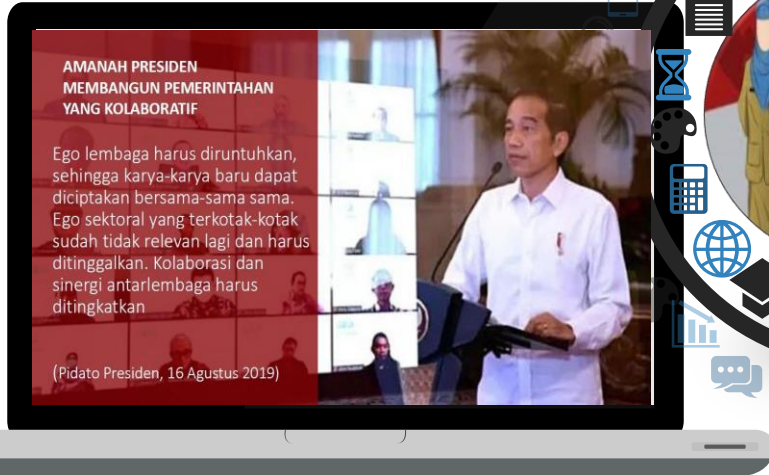


SIAPKAN KEBUTUHAN SDM TALENTA DIGITAL

YANG BERKAITAN DENGAN REGULASI, SKEMA PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN SEGERA DISIAPKAN SECEPAT - CEPATNYA



# Implikasi Terhadap Birokrasi dan ASN



**DAMPAK  
COVID PADA  
ANGGARAN,  
CARA KERJA,  
DAN  
KOMPETENSI  
ASN**

**BIROKRASI  
DITUNTUT  
MAMPU  
MENGEMBAN  
GKAN CARA  
KOLABORATIF**

**KEBUTUHAN  
SEMAKIN BESAR  
UNTUK  
MENGEMBANGKA  
N INOVASI  
DENGAN  
MEMANFAATKAN  
TREND REVOLUSI  
INDUSTRI 4.0**

**TUNTUTAN  
PROFIL  
KOMPETENSI  
ASN  
KREATIFITAS,  
INOVASI, DAN  
MANAJEMEN  
PENGETAHUAN  
(LIHAT TOP**



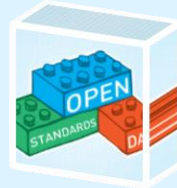
# TANTANGAN Transformasi Digital Pemerintahan



MELAKUKAN  
ASSESSMENT  
PUSAT DATA  
INSTANSI  
PEMERINTAH YANG  
TELAH  
BEROPERASI



MELAKUKAN  
KONSOLIDASI  
INFRASTRUKTUR  
FISIK DAN  
DATABASE DARI  
PUSAT DATA  
INSTANSI KE  
PUSAT DATA  
NASIONAL



MELAKUKAN  
STANDARISASI  
DATA



MELAKUKAN  
KONSOLIDASI  
DATABASE  
PAMERINTAH  
DALAM PUSAT  
DATA NASIONAL  
SEBAGAI SINGLE  
SOURCE OF TRUTH



# TRANSFORMASI DIGITAL DILINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI



# TRANSFORMASI DIGITAL

## DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

### DASAR HUKUM

1. UU NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, PASAL 7,8, DAN 373-383
2. PP NO 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
3. PP NOMOR 95 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK ( SPBE)
4. PERMENDAGRI NO. 35 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2019
5. PERMENDAGRI NO.70 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD)

### FUNGSI KORBINWAS

- 1 Urusan Pemerintah Daerah
- 2 Kelembagaan Daerah
- 3 Kepegawaian pada Perangkat Daerah
- 4 Keuangan Daerah
- 5 Pembangunan Daerah
- 6 Pelayanan Publik di daerah
- 7 Kerja sama daerah
- 8 Kebijakan Daerah
- 9 Kepala Daerah dan DPRD
- 10 Pelayanan Publik Lainnya

### PEMANFAATAN TERKNOLOGI

KOMUNIKASI VIRTUAL DAN VIDEO CONFERENCE (VIDCON)

DATA CENTER BERBASIS CLOUD



APLIKASI DAN SITUS WEB

LOCAL AREA NETWORK (LAN) /WIDE AREA NETWORK (WAN)  
VIRTUAL PRIVATE NETWORK (VPN)

PROSES BISNIS

TRANSFORMASI DIGITAL



# STRATEGI PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL



## INTEGRASI BIROKRASI

- ✓ PENGEMBANGAN TUSI
- ✓ PENGEMBANGAN SOP
- ✓ DE-BOTTLENECKING REGULASI



## INTEGRASI SISTEM INFORMASI

MENGINTEGRASIKAN BEBERAPA APLIKASI YANG MEMPUNYAI PROSES BISNIS, DATA DAN INFORMASI YANG SALING BERHUBUNGAN



## SDM

- ✓ PENINGKATAN KAPASITAS SDM SESUAI TUSI DAN SERTIFIKASI
- ✓ PEMBERDAYAAN SDM AHLI INTER-SECTORAL DAN LINTAS INSTANSI
- ✓ PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR TIK MELALUI PELATIHAN DAN BINTEK
- ✓ REKRUTMEN ASN BERLATAR BELAKANG TI DENGAN BAFUNG PRAKOM



## KONSOLIDASI INFRASTRUKTUR

- ✓ PENGGUNAAN INFRASTRUKTUR BERBAGI PAKAI
- ✓ PEMANFAATAN MULTY-CHANNEL TEKNOLOGI
- ✓ INTEGRASI DENGAN PUSAT DATA NASIONAL



## APLIKASI BERBAGI PAKAI

- ✓ PEMANFAATAN APLIKASI UMUM NASIONAL
- ✓ INTEGRASI DATA DAN INFORMASI UNTUK MEWUJUDKAN SATU DATA NASIONAL



## PEMUKTAHIRAN TEKNOLOGI

MIGRASI APLIKASI MONOLITHIC KE CLOUD NATIVE (MICROSERVICES)





# KONDISI YANG DIHARAPKAN

1

**BIROKRASI  
BERKINERJA  
TINGGI,  
INTEGRATIF,  
TRANSPARAN  
, DINAMIS,  
DAN  
INOVATIF**

2

**PELAYANAN  
PUBLIK YANG  
TERPADU,  
EFEKTIF,  
RESPONSIF,  
ADAPTIF, DAN  
MUDAH  
DIAKSES**

3

**INOVASI TIK  
YANG  
EFEKTIF,  
EFISIEN DAN  
TERINTEGRASI**

4

**SDM YANG  
MEMILIKI  
KEPEMIMPINAN  
(KOLABORATIF  
DAN INOVATIF)  
DAN  
KOMPETENSI**

# TRANSFORMASI DIGITAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SIAK

SIOLA

SIPD

SISKEUDES

eDATABASE

DSB



PUSAT DATA BERBASIS CLOUD



JARINGAN LAN/WAN DAN  
BANDWITH INTERNET



SYSTEM SECURITY



SUMBER DAYA MANUSIA

GAMBARAN TRANSFORMASI DIGITAL DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI





## *Penerapan e-government melalui beberapa aplikasi berbasis web di gunakan oleh pusat dan daerah diantaranya adalah*

**01**

**SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK)**

YANG BEBERAPA JENIS LAYANAN APLIKASI BERBAGI PAKAI DAN TERHUBUNG DENGAN PROVINSI, KOTA/KABUPATEN, KECAMATAN HINGGA KELURAHAN

**02**

**SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA (SISKEUDES)**

UNTUK MELAKUKAN MONITORING DAN PENGAWASAN KEUANGAN DESA

**03**

**SISTEM INFORMASI *ONLINE* LAYANAN ADMINISTRASI (SIOLA)**

UNTUK PENINGKATAN KUALITAS ADMINISTRASI DI KEMENDAGRI DAN PEMERINTAH DAERAH. MODUL DI DALAM SIOLA SEBANYAK 32 LAYANAN ADMINISTRASI DAN 1 LAYANAN KONSULTASI

**04**

**SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD)**

UNTUK MENGINTEGRASIKAN ASPEK PEMERINTAHAN DAERAH, MELIPUTI PROSES PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PELAPORAN, DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

**05**

**E-DATABASE APLIKASI UNTUK PENGUMPULAN DATA/INFORMASI SECARA TERPADU DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI**

## PERAN KEMENDAGRI DALAM SPBE



### PENUGASAN KEMENDAGRI DALAM PERPRES 95/2018 (SPBE)

**MENGKORDINASIKAN  
PROSES BISNIS  
PEMERINTAH  
DAERAH**

**MENGKORDINASIKAN  
PENERAPAN SPBE DI  
PEMDA**

NO.	DOMAIN TUGAS	NAMA TUGAS	DESKRIPSI
1.	PROSES BISNIS	KOORDINASI DAN KONSULTASI PENYUSUNAN PROSES BISNIS SPBE DI PEMDA	MELAKUKAN KORDINASI DAN MENYEDIKAN LAYANAN KONSULTASI PENYUSUNAN PROSES BISNIS PEMDA
2.	LAYANAN SPBE	KOORDINASI PENERAPAN LAYANAN SPBE DI PEMDA	MELAKUKAN KOORDINASI PENERAPAN LAYANAN SPBE DI PEMDA

### INISIATIF STRATEGIS DALAM RENCANA INDUK SPBE NASIONAL

NO.	DOMAIN KEGIATAN	INISIATIF STRATEGIS	KELUARAN	TARGET WAKTU
1.	LAYANAN SPBE	PORTAL LAYANAN PUBLIK YANG TERINTEGRASI	INTEGRASI PROSES BISNIS PELAYANAN PUBLIK PEMDA	2018 – 2025



# PEMANFAATAN SATU DATA



**“KEMENTERIAN DALAM NEGERI TERUS MENDORONG PERCEPATAN PROSES TRANSFORMASI DIGITAL SESUAI AMANAT BAPAK PRESIDEN, MENTERI DALAM NEGERI TERLIBAT SECARA AKTIF DALAM PENYELENGGARAAN DIGITALISASI PEMERINTAHAN SEBAGAI ANGGOTA PADA TIM KOORDINASI SPBE NASIONAL, TIM PERCEPATAN KEBIJAKAN SATU PETA DAN DEWAN PENGARAH SATU DATA INDONESIA”**



**KEMENDAGRI SEBAGAI POROS PEMERINTAHAN DALAM NEGERI ATAU KATALISATOR ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH SESUAI UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DITUNJUK MENJADI KOORDINATOR BINWAS PENYELENGGARAN PEMDA, KHUSUSNYA DALAM TATA KELOLA DATA LINGKUP KEMENDAGRI DAN PEMDA, TELAH DIBANGUN E-DATABASE SEBAGAI BANK DATA PEMERINTAHAN DALAM NEGERI SEBAGAI CIKAL BAKAL PROSES KEBIJAKAN SATU DATA PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (KEMENDAGRI DAN PEMDA) DALAM MEWUJUDKAN SATU DATA INDONESIA**

**KEMENTERIAN/LEMBAGA LAIN SEBAGAI PEMBINA TEKNIS DLM PENYLNGRAN URSN PEMDA YANG DILKSNKN OLEH PEMDA, KHUSUSNYA DALAM PROSES TATA KELOLA DATA PEMDA DAERAH DENGAN MENGUNKN E-DATABASE SATU DATA PEMERINTAHAN DALAM NEGERI AKAN MENCIPTAKAN DATA BERKUALITAS, MUDAH DIAKSES DAN DAPAT DIBERBAGIPAKAIKAN**

**SATU DATA PEMERINTAHAN DALAM NEGERI MERUPAKAN PERWUJUDAN TATA KELOLA SATU DATA INDONESIA YANG SAAT INI MASIH DIPROSES DAN DIKAJI DALAM BENTUK KEBIJAKAN LINGKUP KEMENDAGRI DAN PEMDA, BAIK TATA KELOLA DATA MAUPUN HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH**

**KOMITMEN KEMENDAGRI DALAM Mendukung PRGRM MENUJU INDONESIA DIGITAL 2024, YAITU MWUJDKN SATU DATA PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DALAM KRNGKA SATU DATA INDONESIA, DIMANA SLURH K/L DAN PEMDA DAPAT MENGAKSES DATA PROGRES PRKEMBNGN PNYLENGARAN PEMDA TERKINI, YANG AKURAT, MUTAKHIR, TERPADU, DPT DIPTANGNGJWBKAN, DAN DIBAGIPAKAIKAN, SHINGA MENJADI DASAR DALAM PEMBUAT KEBIJAKAN (POLICY BASED DATA)**



# PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM SATU DATA INDONESIA

## DATA YANG ADA DI KEMENTERIAN DALAM

### NEGERI

1. DATA APBD
2. DATA BUMD
3. DATA PERDA
4. DATA KELEMBAGAAN DAERAH
5. DATA KEPALA DAERAH DAN DPRD
6. DATA PERENCANAAN DAERAH
7. DATA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
8. DATA PROFIL DESA
9. DATA INOVASI DAERAH
10. DATA BATAS WILAYAH
11. DATA KODE DAN NAMA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
12. DATA JENIS DIKLAT PEMERINTAHAN DAN ALUMNI
13. DATA KINERJA DAERAH
14. DATA PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM
15. DATA PILKADA
16. DATA KEPENDUDUKAN



1,905 JUTA KM2	34 PROVINSI	98 KOTA	74.961 DESA
-------------------	----------------	------------	----------------

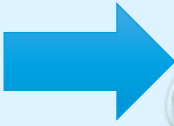
17.491 PULAU	416 KABUPATEN	7.230 KECAMATAN	8.488 KELURAHAN
-----------------	------------------	--------------------	--------------------



# KORDINASI ALUR DATA PEMERINTAHAN DAERAH KE PUSAT



**DATA DIOLAH & DISAJIKAN**



**DATA TEKNIS PEMERINTAHAN DAERAH**

**DATA TEKNIS PEMERINTAHAN DAERAH BERBAGI PAKAI**



**BIRO PEMERINTAHAN/DINAS KOMINFO, STATISTIK /BAPPEDA PROVINSI, KABUPATEN & KOTA**

**KEMENTERIAN & LEMBAGA**



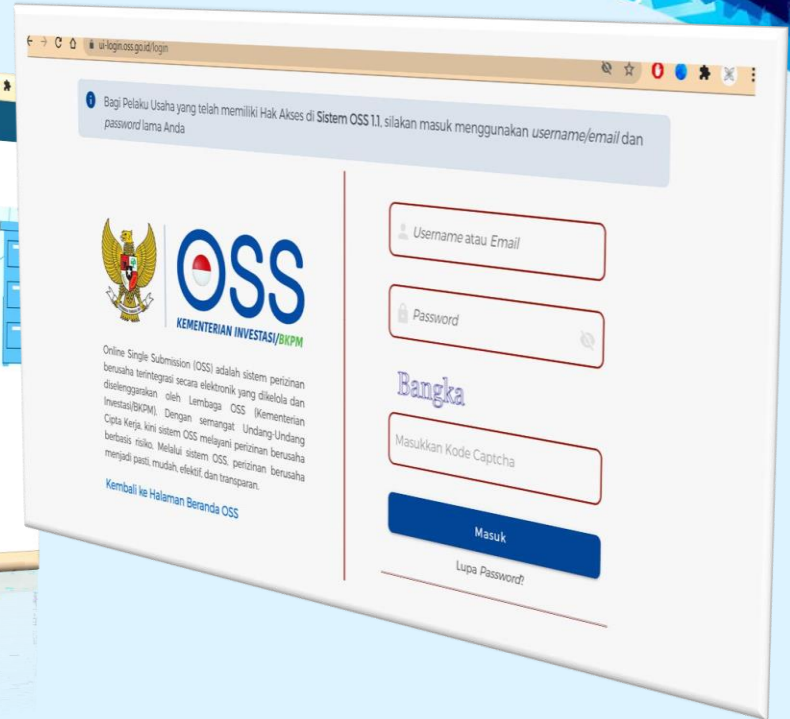
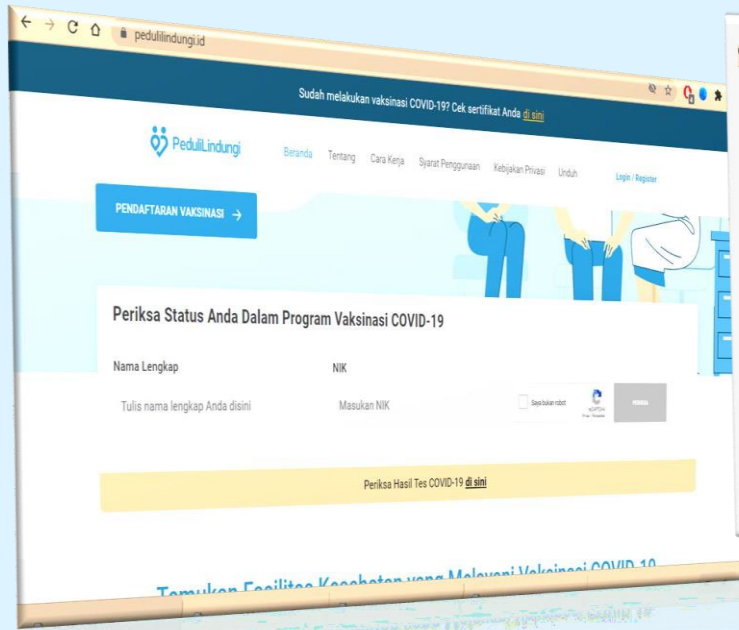




# PELAYANAN PUBLIK DIGITAL



# DIGITAL TERINTEGRASI





# PENYESUAIAN PELAYANAN PUBLIK



Sistem Pelayanan Tatap Muka Langsung



Layanan  
**Alpukat Betawi**

Informasi pelayanan melalui SMS Dengan SMS Masking  
DukcapilDKI

Kanal Web

Jenis Layanan

1. Pencetakan KTP-el
2. Akta Kelahiran (Bagi yang sudah memiliki NIK)
3. Akta Kematian
4. Pencetakan KK
5. Perubahan Biodata (**Activated Account**)
6. Pencetakan KIA
7. Informasi Data Keluarga (**Activated Account**)
8. Pelayanan Arsip (Duplikat Akta, Legalisir)

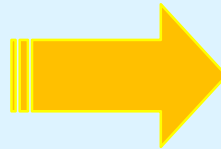
Kanal Mobile App

9. Akta Kelahiran belum memiliki NIK
10. Pindah Dalam DKI
11. Pindah Luar DKI
12. Datang dalam DKI
13. Datang Luar DKI
14. Perkawinan
15. Perceraian

Sistem Pelayanan Berbasis Online (TIK)



# PENYESUAIAN PELAYANAN PUBLIK





@kemendagri



Kemendagri



@kemendagri



[www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id)

Terima Kasih